



**BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2017 ini bisa diselesaikan pada waktunya.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pertanggungjawaban yang memuat gambaran keberhasilan baik makro maupun mikro, langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan, dan kendala dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, laporan kinerja ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya good governance di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Kinerja tersebut diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, telah dapat tercapai kemajuan yang cukup signifikan. Meskipun sangat disadari bahwa dalam laporan ini masih dijumpai sejumlah kekurangan, namun diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang tulus kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2017 ini.

Jakarta,

**KEPALA  
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK**

**Ir. BAMBANG PRIHARTONO, MSCE  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19600825 198811 1 001**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2017 ini bisa diselesaikan pada waktunya.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pertanggungjawaban yang memuat gambaran keberhasilan baik makro maupun mikro, langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan, dan kendala dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, laporan kinerja ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya good governance di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Kinerja tersebut diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, telah dapat tercapai kemajuan yang cukup signifikan. Meskipun sangat disadari bahwa dalam laporan ini masih dijumpai sejumlah kekurangan, namun diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang tulus kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2017 ini.

Jakarta,

**KEPALA  
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK**

**Ir. BAMBANG PRIHARTONO, MSCE**

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Diperiksa	Sigit Irfansyah, ATD., M.Sc	Direktur Perencanaan dan Pengembangan		
2.	Diperiksa	M. Risal Wasal, ATD., MM	Direktur Prasarana		
3.	Diperiksa	Ir. Karlo Manik MNCE	Direktur Lalu Lintas dan Angkutan		
4.	Diperiksa	Firdaus Komarno	Sekretaris Badan		
5.	Disetujui	Ir. Bambang Prihartono, Msce	Kepala BPTJ		

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Dan Fungsi Unit Kerja.....	2
1.3 Sumber Daya Manusia Unit Kerja.....	4
1.4 Potensi, Isu Strategis Dan Permasalahan.....	6
1.5 Sistematika Laporan.....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	11
2.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	11
2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017.....	11
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	14
3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja.....	14
3.2 Pengukuran Capaian Kinerja.....	14
3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 terhadap Target Revisi PK Tahun 2017.....	14
3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2017 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2017.....	16
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2017 Dalam Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019.....	16
3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017.....	17
3.2.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	17

3.2.6	Capaian Keberhasilan Kinerja Unit Kerja Lainnya .....	18
3.3	Realisasi Anggaran .....	18
3.3.1	Alokasi Total Anggaran Tahun 2017 .....	21
3.3.2	Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja .....	21
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>21</b>
4.1	Kesimpulan .....	22
4.1.1	Pencapaian Kinerja Unit Kerja .....	22
4.1.2	Prestasi Unit Kerja Tahun 2017 .....	22
4.2	Saran Tindak Lanjut .....	22
4.2.1	Perencanaan Kinerja .....	22
4.2.2	Pengukuran Kinerja .....	22
4.2.3	Pelaporan Kinerja .....	22
4.2.4	Evaluasi Kinerja .....	22
4.2.5	Capaian Kinerja .....	22
<b>BAB V</b>	<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>23</b>
5.1	Lampiran I Capaian Tahun 2017 .....	23
5.2	Lampiran II Peraturan Perundangan yang Dilegalkan Tahun 2017 (jika diperlukan) .....	23
5.3	Lampiran III Rekapitulasi Realisasi Daya Serap Per Triwulan Tahun Anggaran 2017 .....	23
5.4	Lampiran IV Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 .....	23
5.5	Lampiran V Perjanjian Kerja Tahun 2017 .....	23
5.6	Lampiran VI Perjanjian Kerja Revisi Tahun 2017 .....	23

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL I. 1</b> Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon BPTJ.....	4
<b>TABEL I. 2</b> Jumlah pegawai menurut kualifikasi pendidikan .....	5
<b>TABEL II. 1</b> Rencana Kerja Tahun 2017 BPTJ.....	11
<b>TABEL III. 1</b> Perbandingan Capaian dan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .....	15
<b>TABEL III. 2</b> Perbandingan Capaian Terhadap Target Renstra Kemenhub Tahun 2017 <b>Error!</b> <b>Bookmark not defined.</b>	
<b>TABEL III. 3</b> Capaian Kinerja Direktorat Perencanaan dan Pengembangan .....	18
<b>TABEL III. 4</b> Capaian Kinerja Direktorat Prasarana .....	19
<b>TABEL III. 5</b> Capaian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan .....	19
<b>TABEL III. 6</b> Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Belanja..... <b>Error!</b> <b>Bookmark not defined.</b>	
<b>TABEL III. 7</b> Alokasi Beanja Berdasarkan Jenis Belanja .....	21
<b>TABEL III. 8</b> Alokasi Anggaran Berdasarkan Unit Kerja Eselon II .....	21
<b>TABEL III. 9</b> Dana Tidak Terserap Tahun Anggaran 2017 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>TABEL IV. 1</b> Capaian Sub Sektor BPTJ .....	22

## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR I. 1</b> Struktur Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Sumber Lampiran Peraturan Menteri 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTJ .....	3
<b>GAMBAR I. 2</b> Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon BPTJ .....	5
<b>GAMBAR I. 3</b> Grafik Jumlah pegawai Tiap Kualifikasi Pendidikan .....	5

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, maka disusunlah Laporan Kinerja Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Tahun 2017. Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek selama tahun 2017, berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan di awal pembentukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2017. Komitmen dimaksud merupakan fokus Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang di dalam rumusan tujuan dan sasaran. Laporan Kinerja Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2017 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan maupun kurang berhasil Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama tahun anggaran 2017 berdasarkan tujuan dan sasaran Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2017 adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2017 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan oleh Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang telah ditetapkan, melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2016-2019.

Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategis dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Capaian kinerja (*performance result*) tahun anggaran 2017 dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) yang telah disesuaikan dengan DIPA T.A. 2017 berikut revisinya, sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Analisis atas capaian kinerja tahun 2017 terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.



## 1.2 Tugas Dan Fungsi Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Pasal 2 Kedudukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dipimpin oleh Pejabat Tinggi Madya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

### 1. Tugas Sekretariat BPTJ

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPTJ.

### 2. Fungsi Sekretariat BPTJ

Dalam melaksanakan tugas, sesuai Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Pasal 4, Sekretariat BPTJ menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program, pelaksanaan anggaran, pengelolaan perlengkapan, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan BPTJ;
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dokumentasi dan sosialisasi peraturan, perjanjian, dan pemberian pertimbangan serta advokasi hukum di lingkungan BPTJ;
- c. Pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, administrasi perkantoran, kearsipan serta urusan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan umum di lingkungan BPTJ; dan
- d. Pelaksanaan kehumasan dan hubungan antar lembaga, pengelolaan informasi publik, dan koordinasi pengaduan pelayanan publik serta pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan BPTJ.

### 3. Struktur Organisasi Sekretariat BPTJ

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Pasal 7, susunan Organisasi Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek adalah sebagai berikut:

#### a. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program, pelaksanaan anggaran, pengelolaan perlengkapan, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan BPTJ.

#### b. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan

dokumentasi dan sosialisasi peraturan, perjanjian, dan pemberian pertimbangan serta advokasi hukum di lingkungan BPTJ

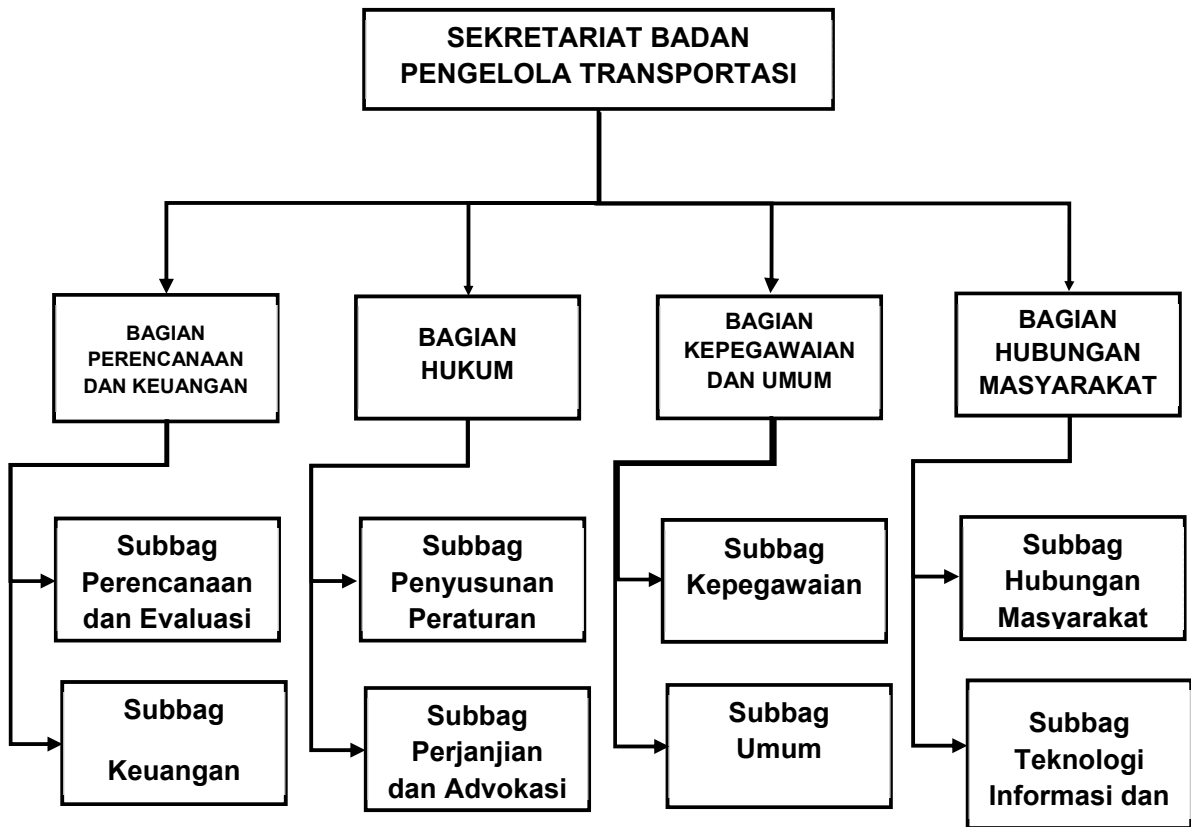
c. Bagian Kepegawaian dan Umum

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, administrasi perkantoran, kearsipan serta urusan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan umum di lingkungan BPTJ.

d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Komunikasi

Bagian Humas dan TIK mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan kehumasan dan hubungan antar lembaga, pengelolaan informasi publik, dan koordinasi pengaduan pelayanan publik serta pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan BPTJ.

Struktur Organisasi Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terdiri dari :



**GAMBAR I. 1** Struktur Organisasi Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Visi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015 – 2019, yaitu “Terwujudnya peningkatan pelayanan, keterpaduan, konektivitas dan mobilitas orang dan barang/ jasa transportasi di wilayah Jabodetabek.” dengan misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa transportasi di wilayah Jabodetabek;
2. Melakukan fasilitasi teknis, pembiayaan dan atau manajemen dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan, pengembangan sarana dan prasarana penunjang angkutan umum, serta pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jabodetabek;
3. Melakukan penyusunan rencana program, kebutuhan anggaran, regulasi dan kebijakan serta rekomendasi penataan ruang dan kebijakan perizinan yang berorientasi angkutan umum massal dan terintegrasi di wilayah Jabodetabek.

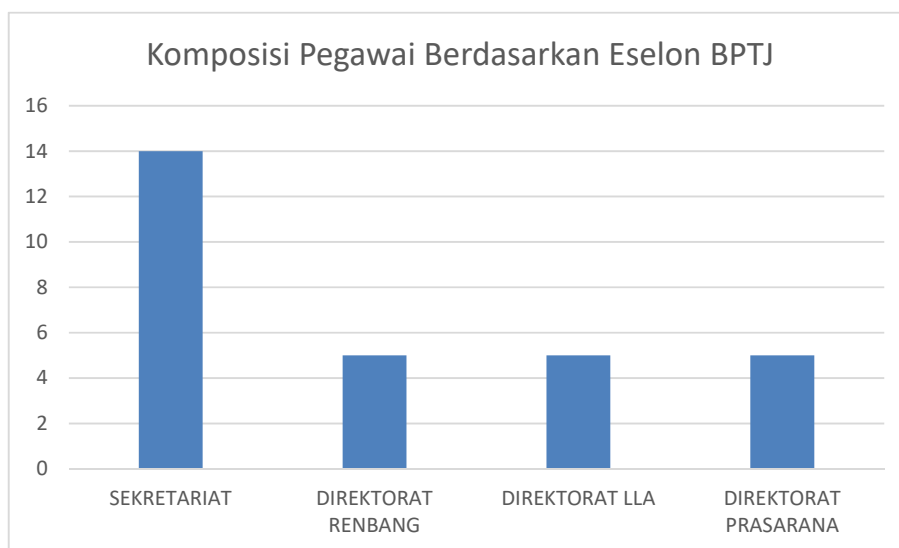
### 1.3 Sumber Daya Manusia Unit Kerja

Dalam menjalankan tugasnya, pada tahun 2017 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek didukung oleh 103 orang pegawai, komposisi pegawai Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek disajikan sebagaimana tabel berikut:

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon BPTJ

**TABEL I. 1** Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon BPTJ

NO.	UNIT	ESELON								JUMLAH
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
1	SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	1	0	1	0	4	0	8	0	14
2	DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	0	0	1	0	3	0	1	0	5
3	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	0	0	1	0	3	0	1	0	5
4	DIREKTORAT PRASARANA	0	0	1	0	3	0	1	0	5
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>29</b>

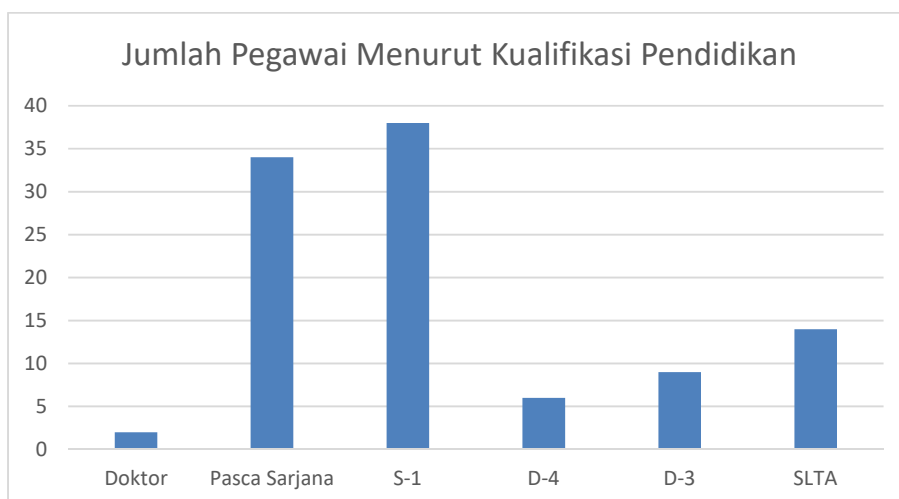


**GAMBAR I. 2** Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon BPTJ

2. Komposisi pegawai menurut kualifikasi pendidikan

**TABEL I. 2** Jumlah pegawai menurut kualifikasi pendidikan

NO.	UNIT	PENDIDIKAN						JUMLAH
		Doktor	Pasca Sarjana	S-1	D-4	D-3	SLTA	
1	SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	0	14	22	0	4	7	47
2	DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	0	8	3	1	2	3	17
3	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	1	7	4	3	2	2	19
4	DIREKTORAT PRASARANA	1	5	9	2	1	2	20
JUMLAH		2	34	38	6	9	14	103



**GAMBAR I. 3** Grafik Jumlah pegawai Tiap Kualifikasi Pendidikan

## 1.4 Potensi, Isu Strategis Dan Permasalahan

Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Peraturan Presiden No. 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek bahwa mobilitas masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi merupakan pergerakan ulang-alik harian, sehingga layanan transportasi harus terintegrasi dan menerus, tidak terkotak-kotak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan. Dalam rangka peningkatan pelayanan, keterpaduan, konektivitas dan mobilitas pergerakan orang dan barang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pengelolaan sistem transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi secara terintegrasi. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah pergerakan kendaraan bermotor yang terus meningkat, untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, diperlukan layanan angkutan massal yang terintegrasi baik antar moda maupun antar wilayah. Pengembangan dan pengelolaan sistem transportasi yang efektif dan efisien akan dapat memperbaiki kondisi saat ini seperti penanganan masalah kemacetan, polusi, biaya tinggi, dan tingkat kecelakaan, sehingga diperlukan penanganan khusus.

Oleh karenanya pengelolaan transportasi Jabodetabek dalam 4 tahun ke depan harus secara sinergis memperhatikan berbagai perkembangan di sektor transportasi secara keseluruhan, sehingga diperoleh kinerja dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Berikut ini disampaikan beberapa perkembangan lingkungan strategis di sektor transportasi nasional yang perlu diperhatikan:

### 1. Perimbangan Pangsa Angkutan Antar Moda (Modal Share)

Indonesia sebagai negara kepulauan yang tersebar dengan lebih dari 17.000 pulau hanya bisa terhubung dengan baik melalui sistem transportasi multimoda, tidak ada satu moda pun yang bisa berdiri sendiri. Masing-masing moda mempunyai keunggulan di bidangnya masing-masing. Pemerintah berfungsi untuk mengembangkan keseluruhan moda tersebut dalam rangka menciptakan sistem transportasi yang efisien, efektif dan dapat digunakan secara aman dapat menempuh perjalanan dengan cepat dan lancar.

Jaringan transportasi dapat dibentuk oleh moda transportasi yang terlibat yang saling berhubungan yang terangkai dalam Sistem Transportasi Nasional (Sistranas). Masing-masing moda transportasi memiliki karakteristik teknis yang berbeda dan pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisi geografis daerah layanan. Untuk wilayah perkotaan seperti Jabodetabek dimana penduduknya memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi, dibutuhkan angkutan massal yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Moda transportasi yang paling sesuai untuk kondisi tersebut adalah jalan dan kereta api yang berbasis angkutan massal.

Pada kenyataannya, berdasarkan analisis atas data survei ATTN 2011 yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, sampai dengan saat ini moda jalan masih sangat dominan di Indonesia, peran angkutan moda jalan mencapai 85% untuk

pergerakan penumpang dan 91% untuk pergerakan barang. Sedangkan peran moda kereta api masih sangat marginal, yakni 3,18% untuk angkutan penumpang dan 0,16% untuk angkutan barang. Mengingat bahwa kapasitas kereta api dalam sekali perjalanan lebih besar dibandingkan dengan angkutan jalan, maka hal tersebut menyebabkan munculnya kemacetan di sejumlah ruas jalan nasional antar kota, khususnya pada ruas yang berbatasan dengan kawasan perkotaan yang sudah padat. Sedangkan jaringan jalan perkotaan mengalami gejala kemacetan yang lebih parah di mana data Bina Sistem Transportasi Perkotaan (2014) menyebutkan di 10 kota termacet di Indonesia kecepatan lalu lintasnya berkisar antara 20-30 km/jam.

Di masa mendatang, pembagian proporsi moda kereta api dan jalan harus berimbang sesuai dengan keunggulan komparatifnya, diantaranya: (1) untuk mengurangi beban jalan pada koridor utama di Jawa dan Sumatera; (2) untuk memberikan akses dari/ke kawasan potensial ke simpul pelabuhan/bandara; (3) untuk menyediakan angkutan massal penumpang di kawasan perkotaan yang aman, nyaman, dan selamat; serta (4) untuk menyeimbangkan kontribusi ekonomi dan penyebaran penduduk ke wilayah lainnya melalui pengembangan jaringan di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua serta skema keperintisan.

## 2. Konektivitas Transportasi Nasional

Tingginya biaya logistik nasional hingga sekitar 26% dari PDB, merupakan salah satu bukti yang harus diakui bahwa penyediaan jaringan dan sistem layanan transportasi nasional belum mampu menyediakan konektivitas yang efisien dan merata. Pengembangan simpul maupun jaringan layanan di masing-masing moda secara fisik belum direncanakan secara terpadu, adapun dari sisi layanan sistem transportasi intermoda/multimoda belum berkembang sama sekali.

Bahkan sampai dengan saat ini belum ada dokumen resmi tentang rencana pengembangan jaringan transportasi nasional yang terintegrasi di seluruh moda. Masing-masing moda masih merencanakan masterplan/rencana induk/tatanan jaringan yang terpisah-pisah dengan pertimbangan intermodality yang sangat terbatas.

Sebagaimana diinginkan dalam agenda pembangunan nasional, seperti MP3EI (Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011) dan SISLOGNAS (Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2012) bahwa dalam 10 tahun ke depan diharapkan sudah terwujud konektivitas transportasi nasional yang efisien dan handal yang menjangkau seluruh titik NKRI melalui jaringan transportasi intermoda/multimoda yang terintegrasi.

Pembangunan transportasi Jabodetabek dalam empat tahun ke depan perlu mengedepankan konsep konektivitas dalam jaringan intermoda/multimoda yang terintegrasi tersebut yang diejawantahkan dalam kebijakan, regulasi, maupun investasi yang dilakukan baik untuk pelayanan penumpang maupun barang antar kota maupun perkotaan. Apalagi sifat layanan dari moda kereta api, laut dan udara yang tidak door-to-door mengharuskan adanya integrasi

melalui moda jalan sebagai feeder/angkutan lanjutan agar daya saingnya dapat dipertahankan.

### 3. Transformasi Regulasi dan Kelembagaan

Sebagaimana diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sektor transportasi Indonesia sedang mengalami proses transformasi dari monopoli negara (atau BUMN yang disertai kewenangan sepenuhnya untuk mengelola suatu moda) ke arah pasar yang lebih terbuka bagi peran swasta maupun Pemda. Hal ini ditandai dengan ditetapkan sejumlah undang-undang baru di sektor transportasi pada periode tahun 2004-2009, diantaranya: UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang baru di sektor transportasi tersebut umumnya memperkenalkan kebijakan pemisahan kelembagaan antara operator dengan regulator serta mendorong partisipasi sektor swasta sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan transportasi. Ke depan Pemerintah akan fokus menjalankan fungsinya sebagai regulator dalam membina penyelenggaraan sektor transportasi nasional yang target utamanya adalah menyediakan kebijakan dan regulasi/tata aturan yang baik dan fair sebagai platform/landasan bagi stakeholders terkait untuk bersaing secara sehat dalam penyediaan layanan transportasi, yang pada akhirnya akan dinikmati hasilnya oleh masyarakat melalui kinerja layanan yang lebih baik dan terjangkau.

Proses transisi dalam regulasi dan kelembagaan di sektor transportasi, termasuk di perkeretaapian, harus segera dituntaskan, karena hal ini akan menjadi landasan bagi terwujudnya sistem penyelenggaraan layanan transportasi yang maju, modern, terbuka, dan berdaya saing tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini amanat UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian untuk memisahkan BUP sarana dengan BUP prasarana untuk jalur yang dimiliki oleh Pemerintah belum terlaksana, agenda ini sangat penting untuk dituntaskan dalam 4 (empat) tahun ke depan. Selain itu, amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan moda angkutan lain sehingga perlu untuk memberikan perhatian lebih pada sektor ini.

### 4. Biaya Logistik Nasional

Pada Tahun 2014, World Bank merilis data bahwa LPI (Logistics Performance Index) Indonesia berada pada ranking 53 dunia, dengan skor 3,08. Sedangkan perkiraan total biaya logistik Indonesia masih sangat tinggi, yakni di atas 25% dari PDB, dengan komposisi 12,04% untuk biaya transportasi, 9,47% untuk biaya persediaan (inventory), dan 4,52% untuk biaya administrasi. Data tersebut menunjukkan bahwa biaya logistik di Indonesia masih relatif tinggi, bahkan jika dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Singapura (8%), Malaysia (13%), dan Thailand (20%).

Moda kereta api memiliki peran penting dalam penurunan biaya logistik nasional, karena daya angkutnya yang besar akan menghasilkan efisiensi dari economic-ofscale jika sistem jaringan kereta api didukung dengan interkoneksinya dengan simpul pelabuhan dan kawasan industri dapat dikembangkan secara optimal. Sementara moda jalan digunakan untuk segmen angkutan barang untuk kapasitas yang tidak terlalu besar dan jarak pendek, khususnya untuk door-to-door service.

Penurunan biaya logistik akan menjadi penentu daya saing Indonesia dalam kancah perekonomian global di mana pasar akan semakin terbuka. Logistik yang murah dan prudent akan memberikan nilai tambah bagi produk nasional, baik dari sisi biaya ataupun kualitas.

#### 5. Konsumsi Energi dan Dampak Lingkungan

Sesuai perhitungan Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, diperkirakan bahwa pada Tahun 2012 sektor transportasi mengkonsumsi BBM bersubsidi sekitar 42 juta KL, dan menyumbang sekitar 60-70% emisi gas rumah kaca (CO<sub>2</sub>). Di masa datang isu energi dan lingkungan akan semakin relevan dengan semakin langkanya sumber energi dan menurunnya daya dukung lingkungan untuk menopang berbagai aktivitas dan kebutuhan warga dunia.

Indonesia melalui RAN-GRK (Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011) berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dengan upaya sendiri jika dibandingkan dengan garis dasar pada kondisi BAU (baseline).

Dengan pengintegrasian transportasi perkotaan, antara jalan dengan kereta api yang akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi, diharapkan akan banyak mengurangi tingkat konsumsi BBM dan emisi gas buang baik untuk angkutan penumpang perkotaan maupun angkutan barang antar kota.

Isu Strategis PengembanganTransportasi Jabodetabek :

1. Tingginya angka kecelakaan di jalan;
2. Pembebanan berlebih pada jalan;
3. Konvergensi kebijakan di bidang angkutan jalan (angkutan umum murah vs mobil murah);
4. Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi;
5. Jumlah dan pelayanan angkutan umum yang belum memadai;
6. Belum tercapainya konektivitas/integrasi;
7. Otonomi daerah;
8. Peningkatan kualitas SDM;
9. Penyelesaian peraturan perundangan.



## 1.5 Sistematika Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

### BAB II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun 2017 yang telah ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan disandingkan dengan pengukuran kinerja berupa capaian yang telah diperoleh selama tahun 2017, yang terdiri dari:

#### a. Tahapan Pengukuran Kinerja

Berisi tentang tahapan yang dilakukan untuk proses pengukuran kinerja serta metode dalam mencapai target yang ditentukan.

#### b. Capaian Kinerja Organisasi

Disajikan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan dilakukan analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja.

#### b. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### BAB IV : Penutup

Tinjauan secara umum dengan mengemukakan capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

### BAB V : Lampiran

Untuk memperjelas Laporan Akuntabilitas Kinerja, dilampirkan perhitungan-perhitungan, gambar dan aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana, metode dan data lain yang relevan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Perencanaan merupakan salah satu empat fungsi manajemen yang penting dan saling terkait satu sama lain. Berbicara tentang perencanaan, kita dihadapkan pada pertanyaan apakah suatu rencana berjalan dengan baik atau tidak. Kesalahan perencanaan dapat berada pada awal perencanaan itu sendiri ataupun pada saat proses perencanaan itu berlangsung.

Dengan adanya perencanaan strategis ini maka konsepsi instansi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana- rencana lain dan dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan strategi dapat menentukan keberhasilan instansi atau organisasi.

### 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017

Rencana Kinerja Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2016 – 2019 yang terdiri dari indikator kinerja serta target yang ditetapkan sebelum DIPA tahun anggaran 2017 ditetapkan.

**TABEL II. 1** Rencana Kerja Tahun 2017 BPTJ

TARGET KINERJA	TARGET TAHUN 2017
Jumlah peraturan/ pedoman/standar yang ditetapkan BPTJ	5 Ketetapan
Jumlah rancangan kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama	3 Dokumen
Jumlah kepesertaan pegawai dalam mengikuti diklat/bimtek sesuai bidangnya	20 Orang
Nilai AKIP BPTJ	83
Jumlah pembangunan aplikasi data dan sistem informasi oleh BPTJ	3 Aplikasi
Persentase penyerapan anggaran BPTJ	85%

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Pada konteks implementasi AKIP, Perjanjian Kinerja adalah rencana kinerja tahunan (*annual performance plan*) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2016 – 2019, yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam empat tahun ke depan. Penetapan Kinerja ini untuk merinci dan memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai kurun waktu satu tahun serta untuk mempermudah terkait dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif).

Maksud Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek tahun 2017 adalah untuk mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2016 – 2019, yang memuat 5 (Lima) Sasaran dan 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama.

Adapun perincian dari masing-masing sasaran adalah sebagai Tabel II.2 berikut:

**Tabel II.2** Perjanjian Kinerja Sekretariat BPTJ Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2017
Meningkatnya jumlah regulasi dan sosialisasi di bidang transportasi	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun	Peraturan	5
	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan	Laporan	5
Meningkatnya jumlah layanan kerjasama Nasional dan Internasional di bidang transportasi serta mengantisipasi adanya permasalahan hukum dari kebijakan yang dikeluarkan	Jumlah rancangan kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka kerjasama di bidang transportasi	Dokumen	3
	Jumlah kegiatan advokasi hukum di bidang transportasi	kegiatan	1
Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Teknis BPTJ sesuai kebutuhan	Jumlah kepesertaan pegawai dalam mengikuti diklat/bimtek sesuai bidangnya	orang	20
	Jumlah pegawai yang memperoleh sertifikat kelulusan mengikuti diklat/bimtek sesuai bidangnya	orang	20
Meningkatnya layanan perkantoran	Pemenuhan kebutuhan layanan perkantoran BPTJ	Tahun	1
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di Lingkungan BPTJ	Nilai AKIP BPTJ	Nilai	83

SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2017
Meningkatnya sistem manajemen perencanaan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi di bidang perencanaan	Laporan	2
	Jumlah laporan evaluasi dan monitoring yang disusun terkait bidang perencanaan	Laporan	2
Meningkatnya penyampaian informasi publik terkait penyelenggaraan transportasi Jabodetabek kepada stakeholder melalui kegiatan kehumasan	Jumlah penyelenggaraan pelayanan informasi publik bagi masyarakat umum	Laporan	1
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan kehumasan	Kegiatan	2
Meningkatnya hubungan antar lembaga terkait menjaga citra positif	Jumlah kegiatan bersama antar lembaga	Kegiatan	1
Meningkatnya kinerja bidang TIK dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan BPTJ	Jumlah kegiatan teknis yang dapat dikerjakan/dibangun dalam mendukung operasional	Kegiatan	3
	Jumlah user yang dapat ditangani	Laporan	1
	Jumlah pemberitaan melalui portal BPTJ yang dapat dirilis	Laporan	1
	Jumlah pembangunan aplikasi data dan sistem informasi oleh BPTJ	Aplikasi	3
	Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi di bidang keuangan	Laporan	5
	Jumlah laporan evaluasi dan monitoring yang disusun terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran/BMN/PNBP	Laporan	2
	Tingkat penyerapan anggaran	%	85

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Untuk mengukur kinerja Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, capaian kinerja pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan rencana tingkat capaian yang telah ditetapkan, sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan dimungkinkan dengan adanya sejumlah deviasi/celah kinerja, sehingga diperlukan strategi perbaikan untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik dimasa mendatang.

### 3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Untuk mencapai sasaran yang ingin di capai pada tahun 2017 maka Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek melaksanakan sebanyak 41 kegiatan yang tercantum pada POK dan beberapa kegiatan prioritas tambahan sesuai arahan Bapak Menteri Perhubungan dan Kepala BPTJ.

Dalam perhitungan persentase pencapaian rencana digunakan rumus sebagai berikut :

- a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka gunakan rumus :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$= \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

### 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja

#### 3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 terhadap Target Revisi PK Tahun 2017

Dalam tahap perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan target revisi perjanjian kinerja tahun 2017 perlu diperhatikan cara atau metode pengukuran kinerja, tabel capaian

kinerja yang dibandingkan dengan target kinerja dapat dilihat dalam tabel perbandingan antara target kinerja dan capaian kinerja berikut ini:

**TABEL III. 1** Perbandingan Capaian dan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2017	CAPAIAN 2017
Meningkatnya jumlah regulasi dan sosialisasi di bidang transportasi	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun	Peraturan	5	5
	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan	Laporan	5	3
Meningkatnya jumlah layanan kerjasama Nasional dan Internasional di bidang transportasi serta mengantisipasi adanya permasalahan hukum dari kebijakan yang dikeluarkan	Jumlah rancangan kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka kerjasama di bidang transportasi	Dokumen	3	11
	Jumlah kegiatan advokasi hukum di bidang transportasi	kegiatan	1	0
Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Teknis BPTJ sesuai kebutuhan	Jumlah kepesertaan pegawai dalam mengikuti diklat/bimtek sesuai bidangnya	orang	20	34
	Jumlah pegawai yang memperoleh sertifikat kelulusan mengikuti diklat/bimtek sesuai bidangnya	orang	20	31
Meningkatnya layanan perkantoran	Pemenuhan kebutuhan layanan perkantoran BPTJ	Tahun	1	1
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di Lingkungan BPTJ	Nilai AKIP BPTJ	Nilai	83	42,28
Meningkatnya sistem manajemen perencanaan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi di bidang perencanaan	Laporan	2	2
	Jumlah laporan evaluasi dan monitoring yang disusun terkait bidang perencanaan	Laporan	2	2
Meningkatnya penyampaian informasi publik terkait penyelenggaraan transportasi Jabodetabek kepada stakeholder melalui kegiatan kehumasan	Jumlah penyelenggaraan pelayanan informasi publik bagi masyarakat umum	Laporan	1	0
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan kehumasan	Kegiatan	2	9

SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2017	CAPAIAN 2017
Meningkatnya hubungan antar lembaga terkait menjaga citra positif	Jumlah kegiatan bersama antar lembaga	Kegiatan	1	1
Meningkatnya kinerja bidang TIK dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan BPTJ	Jumlah kegiatan teknis yang dapat dikerjakan/dibangun dalam mendukung operasional	Kegiatan	3	4
	Jumlah user yang dapat ditangani	Laporan	1	1
	Jumlah pemberitaan melalui portal BPTJ yang dapat dirilis	Laporan	1	1
	Jumlah pembangunan aplikasi data dan sistem informasi oleh BPTJ	Aplikasi	3	3
	Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi di bidang keuangan	Laporan	5	7
	Jumlah laporan evaluasi dan monitoring yang disusun terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran/BMN/PNBP	Laporan	2	24
	Tingkat penyerapan anggaran	%	85	92,41

### 3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016-2017 Terhadap Target Kinerja Tahun 2016-2017

Pada tahun anggaran 2016 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang masih merupakan organisasi baru belum memiliki anggaran sendiri dikarenakan untuk anggaran yang diberikan masih berada di Biro Umum Sekretariat Jenderal. Oleh karena itu untuk penyusunan dokumen evaluasi masih diserahkan ke Biro Umum sehingga belum bisa melakukan penilaian kinerja sendiri dan belum dapat melakukan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditentukan.

### 3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2017 Dalam Renstra BPTJ Tahun 2016-2019

Pada tahun 2017 dalam Rencana Strategis BPTJ tidak terdapat indikator kinerja utama yang bersifat output sehingga untuk realisasi kinerja tahun 2017 Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek tidak dapat dibandingkan terhadap target kinerja yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis BPTJ Tahun 2016-2019 karena indikator kinerja utama yang dicantumkan dalam Renstra hanyalah yang bersifat outcome oleh karena itu capaian hanya bisa diukur dalam indikator kinerja kegiatan di Direktorat Teknis.

**3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017**

**TABEL III. 2** Indikator Kinerja Utama yang tidak tercapai

SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2017	CAPAIAN 2017
Meningkatnya jumlah regulasi dan sosialisasi di bidang transportasi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan	Laporan	5	3
Meningkatnya jumlah layanan kerjasama Nasional dan Internasional di bidang transportasi serta mengantisipasi adanya permasalahan hukum dari kebijakan yang dikeluarkan	Jumlah kegiatan advokasi hukum di bidang transportasi	kegiatan	1	0
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di Lingkungan BPTJ	Nilai AKIP BPTJ	Nilai	83	42,28
Meningkatnya penyampaian informasi publik terkait penyelenggaraan transportasi Jabodetabek kepada stakeholder melalui kegiatan kehumasan	Jumlah penyelenggaraan pelayanan informasi publik bagi masyarakat umum	Laporan	1	0

- a. Pada indikator kinerja Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundangan tidak tercapai dari target yang telah ditentukan. Hal tersebut dikarenakan untuk pelaksanaan beberapa sosialisasi peraturan perundangan yang belum dapat dilaksanakan karena belum selesainya penyusunan Peraturan Presiden terkait Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.
- b. Pada indikator kinerja Jumlah Kegiatan Advokasi Hukum di Bidang Transportasi belum dapat dilaksanakan dikarenakan ....
- c. Pencapaian Nilai AKIP BPTJ tidak sesuai dengan yang ditargetkan dikarenakan pada saat penilaian dokumen akuntabilitas ada beberapa dokumen yang masih menjadi kewajiban Biro Umum sehingga belum dapat disusun karena BPTJ yang merupakan organisasi baru yang pada saat itu anggarannya masih berada di Biro Umum.
- d. Pada indikator kinerja utama Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Bagi Masyarakat Umum tidak sesuai dengan target yang ditetapkan karena ...



### 3.2.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya

NO	URAIAN TUGAS DAN JABATAN / UNIT KERJA	HASIL KERJA (BK)	BEBAN KERJA / BK/ Th	JAM KERJA / BK	JAM KERJA / BK / Th	JAM KERJA EFEKTIF/Th
1	BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	PROGRAM PENGELOLAAN TRANSPORTASI JABODETABEK	-	-	-	
<b>JUMLAH TOTAL JAM KERJA EFEKTIF PER TAHUN</b>					-	
<b>JUMLAH JAM KERJA EFEKTIF PER PEGAWAI PER TAHUN</b>						- Jam
<b>PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI YAITU - : - x Orang = - (- Orang)</b>						

JUMLAH PEGAWAI PEMANGKU JABATAN SAAT INI : (-) PEGAWAI DAN HONORER

JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI STANDAR/TETAP : (-) PEGAWAI

KEKURANGAN PEGAWAI : (-) PEGAWAI

KELEBIHAN PEGAWAI : (-) PEGAWAI

### 3.2.6 Capaian Keberhasilan Kinerja Unit Kerja Lainnya

#### a. Bagian Perencanaan dan Keuangan

**TABEL III. 3** Capaian Kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan

SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2017	CAPAIAN 2017
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di Lingkungan BPTJ	Nilai AKIP BPTJ	Nilai	83	42,28
Meningkatnya sistem manajemen perencanaan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi di bidang perencanaan	Laporan	2	2
	Jumlah laporan evaluasi dan monitoring yang disusun terkait bidang perencanaan	Laporan	2	2
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan di Lingkungan BPTJ	Jumlah dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi di bidang keuangan	Laporan	5	7

SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2017	CAPAIAN 2017
	Jumlah laporan evaluasi dan monitoring yang disusun terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran/BMN/PNBP	Laporan	2	24
	Tingkat penyerapan anggaran	%	85	92,41

b. Bagian Hukum

**TABEL III. 4** Capaian Kinerja Bagian Hukum

SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2017	CAPAIAN 2017
Meningkatnya jumlah regulasi dan sosialisasi di bidang transportasi	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun	Peraturan	5	5
	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan	Laporan	5	3
Meningkatnya jumlah layanan kerjasama Nasional dan Internasional di bidang transportasi serta mengantisipasi adanya permasalahan hukum dari kebijakan yang dikeluarkan	Jumlah rancangan kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka kerjasama di bidang transportasi	Dokumen	3	11
	Jumlah kegiatan advokasi hukum di bidang transportasi	kegiatan	1	0

c. Bagian Kepegawaian dan Umum

**TABEL III. 5** Capaian Kinerja Bagian Kepegawaian dan Umum

SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2017	CAPAIAN 2017
Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur Teknis BPTJ sesuai kebutuhan	Jumlah kepesertaan pegawai dalam mengikuti diklat/bimtek sesuai bidangnya	orang	20	34
	Jumlah pegawai yang memperoleh sertifikat kelulusan mengikuti diklat/bimtek sesuai bidangnya	orang	20	31
Meningkatnya layanan perkantoran	Pemenuhan kebutuhan layanan perkantoran BPTJ	Tahun	1	1

d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Komunikasi

**TABEL III. 6** Capaian Kinerja Bagian HUMAS dan TIK

<b>SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET 2017</b>	<b>CAPAIAN 2017</b>
Meningkatnya penyampaian informasi publik terkait penyelenggaraan transportasi Jabodetabek kepada stakeholder melalui kegiatan kehumasan	Jumlah penyelenggaraan pelayanan informasi publik bagi masyarakat umum	Laporan	1	0
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan kehumasan	Kegiatan	2	9
Meningkatnya hubungan antar lembaga terkait menjaga citra positif	Jumlah kegiatan bersama antar lembaga	Kegiatan	1	1
Meningkatnya kinerja bidang TIK dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan BPTJ	Jumlah kegiatan teknis yang dapat dikerjakan/dibangun dalam mendukung operasional	Kegiatan	3	4
	Jumlah user yang dapat ditangani	Laporan	1	1
	Jumlah pemberitaan melalui portal BPTJ yang dapat dirilis	Laporan	1	1
	Jumlah pembangunan aplikasi data dan sistem informasi oleh BPTJ	Aplikasi	3	3

### 3.3 Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2017 Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek berhasil melakukan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.090.670.871,- (84,56%) dari total anggaran sebesar Rp. 52.142.866.000,- dengan sisa nilai anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 8.052.195.129,- yang terdiri dari belanja pegawai, sisa kontrak, dan dana cadangan.

#### 3.3.1 Alokasi Total Anggaran Tahun 2017

Pada tahun anggaran 2017 Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 52.142.866.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di 4 Unit Eselon III antara lain Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Hukum, Bagian Kepegawaian dan Umum, Bagian HUMAS dan TIK. Total alokasi anggaran tahun 2017 dibagi menjadi tiga jenis belanja dengan pembagian alokasi belanja dengan prosentase sebagai berikut:

**TABEL III. 7** Alokasi Belanja Sekretariat BPTJ Berdasarkan Jenis Belanja

NO	JENIS BELANJA	RUPIAH (Rp. 000)	PROSENTASE (%)
1	Belanja Pegawai	18.558.480	35,60
2	Belanja Barang	28.682.744	55,03
3	Belanja Modal	4.882.312	9,37
TOTAL		52.123.536	100,00

#### 3.3.2 Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Jumlah anggaran yang tidak terserap oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek adalah sebesar Rp. 8.052.195.129,- yang terdiri dari yang terdiri dari belanja pegawai, sisa kontrak, dan dana cadangan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di dalam menyusun dan melaksanakan program kerja tahun 2017 mengacu pada visi dan misi Kementerian Perhubungan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Untuk menjabarkan visi dan misi telah disusun rencana strategis yang berisi antara lain kebijakan pembangunan Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), sasaran, strategi yang ditempuh, program dan kegiatan Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Tahun 2016 s.d 2019.

#### **4.1.1 Pencapaian Kinerja Unit Kerja**

#### **4.1.2 Prestasi Unit Kerja Tahun 2017**

Selama pelaksanaan anggaran tahun 2017 yang telah dilakukan Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek telah tercapai beberapa prestasi yang telah dihasilkan untuk memberikan pelayanan di bidang transportasi yang lebih baik kepada masyarakat antara lain sebagai berikut:

**TABEL IV. 1** Capaian Sekretariat BPTJ

### **4.2 Saran Tindak Lanjut**

- 4.2.1 Perencanaan Kinerja
- 4.2.2 Pengukuran Kinerja
- 4.2.3 Pelaporan Kinerja
- 4.2.4 Evaluasi Kinerja
- 4.2.5 Capaian Kinerja

**BAB V**  
**LAMPIRAN**

- 5.1 Lampiran I Capaian Tahun 2017
- 5.2 Lampiran II Peraturan Perundangan yang Dilegalkan Tahun 2017 (jika diperlukan)
- 5.3 Lampiran III Rekapitulasi Realisasi Daya Serap Per Triwulan Tahun Anggaran 2017
- 5.4 Lampiran IV Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017
- 5.5 Lampiran V Perjanjian Kerja Tahun 2017
- 5.6 Lampiran VI Perjanjian Kerja Revisi Tahun 2017